

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Agustino, L. (2017). *Dasar-dasar kebijakan publik*. Bandung: Alfabeta.
- Andayaningsih, H. (2018). *Evaluasi kebijakan publik*. Yogyakarta: Deepublish.
- Anggara, S. (2014). *Kebijakan publik*. Bandung: Pustaka Setia.
- Arifin, T. (2018). *Implementasi kebijakan dalam perspektif administrasi publik*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Endah, N. (2017). *Model implementasi kebijakan publik*. Yogyakarta: Gava Media.
- Grindle, M. S. (1980). *Politics and policy implementation in the third world*. Princeton: Princeton University Press.
- Harbani, P. (2009). *Dasar-dasar ilmu administrasi negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Iskandar. (2017). *Pengantar ilmu kebijakan publik*. Jakarta: Prenada Media.
- Mansur, J. (2021). *Kebijakan publik: Teori dan implementasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mulyadi, D. (2018). *Administrasi publik dan kebijakan publik*. Bandung: Alfabeta.
- Putri, A. (2020). *Implementasi kebijakan publik di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Sjamsuddin. (2016). *Administrasi publik*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugiyono. (2013). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suaib. (2016). *Teori dan proses kebijakan publik*. Yogyakarta: Deepublish.
- Setyaningsih, I. (2013). Service quality and its dimensions. *Spektrum Industri*,

4(2), 38–41.

Wahyulianti, M. (2022). Evaluasi Kebijakan Dinas Sosial Dalam melaksanakan Ketertiban Sosial di Kota Pekanbaru. *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics*, 6(2), 1–10. [https://doi.org/10.25299/jkp.2020.vol6\(2\).4963](https://doi.org/10.25299/jkp.2020.vol6(2).4963).

## **Jurnal**

Edwards III, G. C. (dalam Agustino, L., 2017). *Dasar-dasar kebijakan publik*. Bandung: Alfabeta.

Header, A. (2010). Implementasi kebijakan publik di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial*, 5(1), 1–10.

Meter, D. L., & Horn, C. E. (1975). The policy implementation process: A conceptual framework. *Administration & Society*, 6(4), 445–488.

Nurhaliza, & Ruhaeni. (2021). *Pemenuhan syarat penyusunan dokumen AMDAL berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup...* [Detail penerbit belum lengkap].

Oktasari, D. (2015). Implementasi kebijakan dalam pemerintahan daerah. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*.

Panggabean, D. (2016). *Persepsi masyarakat terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan Tahun 2011–2031*.

Ratri, I. (2014). *Pelaksanaan kebijakan publik: Studi tentang implementasi*.

Kuswati, A.. *Kriteria penetapan lokasi stasiun kereta api penumpang*.

## **Undang-undang**

Pemerintah Kota Lhokseumawe. (2014). *Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Lhokseumawe Tahun 2012–2032*.

Pemerintah Kota Lhokseumawe. (2019). *Qanun Kota Lhokseumawe Tahun 2019 Pasal 12 Ayat 6 tentang Jaringan Transportasi Kereta Api*.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia. (2009). *Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 17/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian. (2007). *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. (2007). *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725*.

## **Artikel Berita dan Online**

Detik Finance. (2014, April 28). 11 tahun mangkrak, rel kereta api Aceh kembali dibangun. *Detik.com*. <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-2562060/11-tahun-mangkrak-rel-kereta-api-aceh-kembali-dibangun>

Serambi News. (2022, Oktober 27). Warga Blang Mameh Lhokseumawe tolak jalur rel kereta api yang dekat pemukiman. <https://aceh.tribunnews.com>